

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan mendalam tentang Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Fatwa MUI Nomor: 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai otoritas keagamaan dalam hal penerbitan fatwa, menyampaikan dukungan secara moral dan etis terhadap perjuangan rakyat Palestina. Sebagai bentuk respons terhadap meningkatnya eskalasi konflik, komisi fatwa MUI menerbitkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa tersebut menegaskan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina serta menyerukan pemboikotan terhadap Israel. Pemboikotan ini merupakan tindakan untuk menolak berhubungan dengan Israel dalam urusan ekonomi dan sosial. Pemboikotan ini berbentuk boikot non-komersial bermotif politik, karena tindakan pemboikotannya dilakukan tanpa disertai motif bisnis atau keuntungan ekonomi, namun terfokus pada penyampaian pesan politik untuk mendorong perubahan kebijakan. Pemboikotan dalam fatwa ini berorientasi pada rasa solidaritas dan saling tolong-menolong dalam menegakkan nilai kemanusiaan, dengan tujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

2. Hukum Persaingan Usaha secara umum merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatur hal-hal yang mencakup ketentuan substansial tentang larangan terhadap berbagai tindakan yang dianggap merugikan mekanisme persaingan, beserta konsekuensi hukum yang menyertainya. Dijelaskan dalam regulasi tersebut tentang berbagai macam perjanjian yang dilarang, salah satunya ialah perjanjian pemboikotan. Setelah melakukan analisis mengenai pemboikotan dalam Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina yang berisi seruan pemboikotan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Hukum Persaingan Usaha yang secara umum merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak, hal ini didasarkan pada tidak terpenuhinya unsur-unsur yang ditetapkan dalam Perjanjian Pemboikotan Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh seruan pemboikotan dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Sehingga, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina dinyatakan tidak termasuk sebagai perjanjian pemboikotan yang dimaksud.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, peneliti menyampaikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat diharapkan bisa lebih selektif dalam memilih dan membeli suatu produk, khususnya terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel. Kesadaran akan permasalahan global juga perlu ditingkatkan, salah satunya konflik Palestina dan Israel. Sebagai sesama umat Islam, sangat penting untuk memberi perhatian lebih terhadap nilai moral, nilai kemanusiaan dan solidaritas untuk mewujudkan perdamaian di Palestina.
2. Majelis Ulama Indonesia diharapkan bisa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai fatwa yang dikeluarkan. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa memahami isi fatwa dengan baik dan mencegah timbulnya polemik di masyarakat. Diantaranya ialah menetapkan secara spesifik tentang produk mana saja yang harus dihindari dengan mencantumkan daftar nama produknya. Selain itu, MUI bersama Pemerintah diharapkan bisa berkolaborasi demi mewujudkan kemaslahatan yang berkeadilan. Sehingga dalam situasi seperti ini tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Pemerintah bersama MUI dan lembaga terkait diharapkan bisa membangun pondasi untuk memperkuat ekonomi Islam melalui Industri halal, keuangan syariah dan pemberdayaan UMKM, sebagai upaya kemandirian ekonomi dan mengimbangi dominasi ekonomi luar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2017). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Buthi, R. (1999). *Man' an-Nas wa Musyawarah wa Fatawa*. Dar al-Fikr.
- Al-Hakim, S. (2013). Perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 13(1). <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.15-31>
- Al-Maraghi, M. A. (1987). *Terjemah Tafsir Al- Maraghi*. Tohaputra.
- Al-Qardhawi, Y. (1989). *Al-Ijtihad Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. Dar al-Qalam.
- Al-Syatibi, A. I. I. (1992). *Al-Muwafaqat Fi Ushuli Al-Ahkam (Juz IV)*.
- Amin, M. (2008). *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Paramuda Advertising.
- Amin, M. (2011). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Erlangga.
- Andi Sani Silwana, Kurniati, & Abd. Rahman R. (2023). Peran Fatwa dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.55623/au.v4i1.177>
- Anisah, S. (2015). Pengaturan dan Penegakan Hukum Pemboikotan dalam Antitrust Law Amerika Serikat. *Jurnal Media Hukum*, 22, No 2.
- Apriani, D. (2022). Konflik Norma Antara Perlindungan Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dengan Perlindungan konsumen. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No, 14–33.
- Atriadi. (2012). *Analisa Fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang Pemboikotan barang produksi Israel dan Amerika menurut Fiqh Muamalah*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Baqi, M. F. A. (2017). *Shahih Bukhari-Muslim*. Elex Media Komputindo.
- Baroroh, A. (2018). *Trik-Trik Analisis DAta dengan SPSS15*. CV Jejak.
- BDS National Committee. (2025). *Indicator Of BDS Movement's Global Impact*.
- Cahya, E. N. (2022). Agresi Israel Terhadap Palestina Yang Berujung Pelanggaran Ham Pada Palestina. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 3(1). <https://doi.org/10.26418/jppkn.v3i1.52144>
- Cruz, B. de P. A. (2017). Social Boycott. *Journal Revista Brasileira de Gastao de Negocios*, 19.
- Farhan, A. (2019). Pelaksanaan Sertifikasi Halal Lppom Mui Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) (Studi Lppom Mui Provinsi

- Bengkulu). *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1).  
<https://doi.org/10.29300/mjppm.v3i1.2340>
- Fauziah. (2025). *BRIN-IHW Rilis Hasil Fatwa Boikot dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Industri*.
- Fuadi, M. (2003). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. PT Citra Aditya Bakti.
- Grimes, L. A. S. & W. S. (2000). *The Law of Antitrust: An Integrated Handbook*. West Group Publishing.
- Hadi, S. (2002). *Metodelogi Research*. Andi Offset.
- Handriani, A. (2019). Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).  
<https://doi.org/10.32493/rjih.v1i2.2218>
- Hansen, K. (2001). *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Katalis.
- Harmaizar. (2008). *Menangkap Peluang Usaha*. CV Dian Anugerah Prakasa.
- Harman, A. H. G. N. dan B. K. (1999). *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli*. Elex Media Komputindo.
- Hasanah, S. (2016). *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia*.  
[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia/#\\_ftn](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia/#_ftn).
- Hawwa, S. (2006). *Al-Mustakhlash Fi Tazkiyatil-Anfus*. Pena Pundi Aksara.
- Hermansyah. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Kencana Creative Media.
- Kagramanto, B. (2010). *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Laras.
- Kagramanto, L. B. (2008). *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*. Srikandi.
- Kasdi, A. (2018). Contribution of National Sharia Council Fatwa of Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) in the Islamic Economic Development in Indonesia. *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 11, N.
- KBBI. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Khemani, R. S. (1996). *Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law*. OECD.
- Laila, I. (2024). Analisis Dampak Sosial Boikot Produk Israel. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 1, 324–330.

- Lailatu Qomariyah. (2018). *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NOMOR 75/DSN-MUI/VII/2009 Terhadap Bisnis Mlm Syariah Paytren*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Lubis, A. F. (2006). *Hukum Persaingan Usaha*. KPPU RI.
- Lubis, A. F. (2009). *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*. Creative Media.
- Lubis, M. S. (2010). *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Alumni.
- Ma'mur, J. (2018). Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara, (Talfiq Manhaji sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI). *Wahana Akademika Jurnal Studi Islam Dan Sosial, Vol. 5, No.*
- Makrufah, A. (2024). Perlawanan Terhadap Genosida: Analisis Dampak Fatwa MUI Tentang Boikot Perusahaan Terafiliasi Israel. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 24.*
- Mandzur, I. (1990). *Lisan al-Arab (XV)*. Dar Shadir.
- Mardani. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Islam Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Margareth, A. (2024). Boikot Barang Israel: Strategi Perlawanan dan Solidaritas Global Dalam Mendukung Perjuangan Palestina. *Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora, 2.*
- Margono, S. (2009). *Hukum Anti Monopoli*. Sinar Grafika.
- Masriani, Y. T. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.
- Maulana, I. B. (2000). *Catatan singkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. PT Citra Aditya Bakti.
- Meneell, R. L. (1979). *Will and Trusts In A Nutshell*. West Publishing Co.
- Merriam-Webster Dictionary. (2023). *Boycott*. Merriam Webster; Merriam-Webster. [www.merriam-webster.com/dictionary/%0Aboycott](http://www.merriam-webster.com/dictionary/%0Aboycott)
- Mudzhar, A. (2012). *Fatwa MUI dala Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*. Puslitbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Muhaimin, M. (2022). Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 13(1)*. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14314>
- MUI. (2023). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*.

- Nafis, C. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. UI Press.
- Nawawi, H. (1996). *Penelitian Terapan*. Gadjah Mada University Press.
- Note. (1980). *Protest Boycotts Under the Sherman Act*. University Pennsylvania.
- Nugroho, S. A. (2014). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Prenada Media.
- Pelu, I. E. A. S., & Tarantang, J. (2020). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2). <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3927>
- Ranggawidjaja, R. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Mandar Maju.
- Refendy, R. R. (2022). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Ritter, L. (2000). EC Competition Law. *Kluwer Law International*, 2.
- Ross, S. F. (1993). *Principles of Antitrust Law*. The Foundation Press, Inc.
- Sadlan, S. bin G. al. (1997). *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha*. Daru Balansiyah.
- Sahroni, O. (2017). *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam* (Ed. 1. Cet). Rajawali Pers.
- Sardjono, A. (1998). *Pentingnya Sistem Persaingan Usaha Yang Sehat Dalam Upaya Memperbaiki Sistem Perekonomian*. Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.
- Sari, P. S. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Prenadamedia.
- Sidqi, I., & Witro, D. (2020). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(01). <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>
- Sumarni, M. (2022). Analisis SWOT sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing UMKM di Kota Langsa. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, Vol. 6 No.
- Tari, D. Z. A. (2021). *Dinamika Gerakan Anti Globalisasi Tahun 1994-2001*. Universitas Islam Indonesia.
- Usman, R. (2013). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Zahidin. (2022). Filsafat dan Sejarah Perkembangan Ilmu Hukum Islam. *Jurnal Literasiologi*, Vol. 8, No.